

# LKPD BAB 1 Analisa artikel terkait Badan Usaha

## TUGAS KELOMPOK

1. Bergabunglah ke dalam 6 kelompok (picker online)
2. Pahami artikel tentang badan usaha yang sudah ditentukan
3. Diskusikan tentang 5W dan 1H (what, when, where, why, who dan how)
4. Buatlah Kesimpulan terkait isi artikel dan tulislah pengetahuan/wawasan baru yang kalian dapatkan
5. Hasil diskusi ditulis di kertas yang sudah disediakan
6. Bekerjasamalah dengan baik dan penuh sportivitas.

# Presiden Prabowo Resmikan Kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam laporannya menyebutkan bahwa peluncuran kelembagaan koperasi ini merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil.



Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Dipublikasikan pada Senin, 21 Juli 2025 15:25 WIB

Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025. Kepala Negara tiba di lokasi acara dan langsung disambut meriah para tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan ketua koperasi, yakni Bambang Gunarsa (KDMP Bentangan, Klaten), Jamaluddin Adiwijaya (KDMP Sumbung, Boyolali), Parni (KDMP Karangdowo, Klaten), Sumanto (KKMP Banyuanyar, Surakarta), dan Rizka Hidayati (KDMP Ceper, Klaten).

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam laporannya menyebutkan bahwa peluncuran kelembagaan koperasi ini merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil.

“Hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia: koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi yang tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden,” ujar Zulhas.

Sementara itu dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. Kepala Negara juga menegaskan bahwa peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional

strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.

“Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih dari sekadar legalitas kelembagaan, Presiden Prabowo juga menyebut bahwa koperasi-koperasi ini akan didukung dengan infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Selain itu, akan terdapat pula fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa.

“Kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa, jadi bisa. 80 ribu,” ujarnya. Acara peluncuran kemudian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya gerakan besar koperasi Merah Putih untuk mewujudkan kemerdekaan ekonomi rakyat Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.

(BPMI Setpres)

<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-resmikan-kelembagaan-80-081-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih/>

# Del Monte Bangkrut Usai 138 Tahun Berdiri, Terlilit Utang Rp162 T

CNN Indonesia

Jumat, 04 Jul 2025 12:20 WIB



Del Monte Foods resmi mengajukan kebangkrutan dan tengah mencari pembeli untuk seluruh asetnya. Pengumuman itu disampaikan pada Selasa (2/7) waktu setempat. (REUTERS/Bing Guan).

Jakarta, CNN Indonesia -- Del Monte Foods resmi mengajukan kebangkrutan dan tengah mencari pembeli untuk seluruh asetnya. Pengumuman itu disampaikan pada Selasa (2/7) waktu setempat. Perusahaan makanan yang telah berdiri selama 138 tahun dan dikenal luas melalui produk buah serta sayuran kaleng itu menyatakan secara sukarela mengajukan perlindungan kebangkrutan di bawah Bab 11 (Chapter 11) ke pengadilan dan memulai proses penjualan aset perusahaan secara menyeluruh.

"Setelah evaluasi menyeluruh terhadap berbagai opsi, kami menyimpulkan bahwa proses penjualan di bawah pengawasan pengadilan merupakan cara paling efektif untuk mempercepat pemulihan dan membentuk Del Monte Foods yang lebih kuat dan berkelanjutan," kata Presiden dan CEO Del Monte Foods Greg Longstreet dalam pernyataannya, melansir CNN Business.

Del Monte dikenal melalui berbagai merek yang akrab di dapur rumah tangga, termasuk College Inn untuk kaldu, Contadina untuk tomat kaleng, serta merek utama mereka, Del Monte sendiri.

Dalam dokumen pengadilan, Del Monte tercatat memiliki estimasi utang antara US\$1 miliar atau setara Rp16,22 triliun (asumsi kurs Rp16.220 per dolar AS) hingga US\$10 miliar atau Rp162,22 triliun. Meski begitu, perusahaan telah mengamankan pendanaan baru senilai US\$912,5 juta atau Rp14,80 triliun untuk menjaga operasional tetap berjalan normal selama proses penjualan berlangsung, terutama menjelang musim pengalengan yang menjadi puncak produksi mereka.

Longstreet menambahkan perusahaan selama ini menghadapi berbagai tantangan berat, terutama akibat kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu faktor utama, seperti pengurangan belanja dan pergeseran preferensi ke produk private label (merek toko sendiri) yang cenderung lebih murah.

Selain itu, menurut Sarah Foss, Kepala Global Bidang Hukum dan Restrukturisasi di Debtwire, Del Monte

mengalami lonjakan biaya karena penurunan permintaan dari konsumen.

Akibatnya, perusahaan harus menanggung biaya tambahan untuk menyimpan kelebihan stok dan melakukan promosi besar-besaran guna mempercepat penjualan.

Ita juga menyebut konsumen kini semakin menghindari makanan kaleng yang mengandung pengawet dan lebih memilih produk yang dianggap lebih sehat.

Del Monte sendiri didirikan pada 1886 dan membangun pabrik pengalengan terkenalnya di San Francisco pada 1907. Hanya dua tahun kemudian, pada 1909, perusahaan ini mengklaim telah mengoperasikan pabrik pengalengan buah dan sayur terbesar di dunia.

Dengan struktur modal yang diperbaiki, posisi keuangan yang lebih kuat, serta kepemilikan baru, Del Monte berharap dapat meraih kesuksesan jangka panjang dan kembali menjadi pemain utama di industri makanan.

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250703141713-92-1246500/del-monte-bangkrut-usai-138-tahun-berdiri-terlilit-utang-rp162-t.](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250703141713-92-1246500/del-monte-bangkrut-usai-138-tahun-berdiri-terlilit-utang-rp162-t)

# Lewat Green Procurement, Pertamina Ajak Mitra Berkontribusi pada Keberlanjutan

Kompas.com - 25/07/2025, 11:07 WIB Dwi NH Penulis



KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) memperkuat proses pengadaan dengan menerapkan green procurement atau pengadaan berprinsip keberlanjutan. Melalui ajang Pertamina Supplier Relationship Management (SRM) 2025, Pertamina mendorong mitra kerja, pemasok, dan vendor untuk menjalankan aktivitas sesuai asas keberlanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pengurangan emisi, peningkatan keselamatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, komitmen ini disampaikan Pertamina kepada mitra kerja, pemasok, dan vendor dalam SRM yang digelar di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

"SRM menjadi ajang rutin Pertamina bersama mitra kerja untuk menyampaikan kondisi dan regulasi terbaru terkait proses pengadaan, serta penegasan kembali praktik green procurement," ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (25/7/2025). Fadjar menambahkan, green procurement mendorong semua pihak menjadi perusahaan yang bertanggung jawab pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, sejalan dengan komitmen Pertamina terhadap keberlanjutan.

"Kami berharap, dengan komitmen ini, Pertamina bersama mitra kerja dapat berkontribusi mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan aman, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Pada kesempatan yang sama, SVP Procurement Pertamina Hery Murahmanta mengatakan, aspek keberlanjutan menjadi asas penting dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pertamina. Hal ini diterapkan melalui proses pengadaan yang efektif dan efisien, antara lain melalui sentralisasi kontrak payung serta inovasi sistem pengadaan, seperti Price Database & Market Intelligence Tools (PREDICT) dan standarisasi Kode Identifikasi Material Pertamina (KIMAP). Menurut Hery, green procurement juga memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap tahapan pengadaan, termasuk aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (health, safety, security, and environment/HSSE), serta penggunaan sistem digital dalam pengadaan barang dan jasa. "Pertamina harus dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan, salah satunya melalui green procurement. Karena itu, penting untuk membangun ekosistem Pertamina bersama vendor yang peduli dan mewujudkan keberlanjutan melalui berbagai program," tegasnya.

Dalam kegiatan SRM tersebut, Pertamina juga memaparkan 10 Fokus Keberlanjutan Pertamina yang mencakup tiga aspek, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola. Fokus keberlanjutan ini tidak hanya berlaku bagi Pertamina, tetapi juga seluruh rantai bisnis termasuk mitra kerja, pemasok, dan vendor.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/07/25/11070001/lewat-green-procurement-pertamina-ajak-mitra-berkontribusi-pada>

# Gencar Salurkan CSR, Bukti Nyata Bank Jatim Berkontribusi untuk Negeri

Date: 28 desember 2023



MADIUN, 28 Desember 2023. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) secara resmi telah menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) ke dua daerah sekaligus, yaitu Pemkot Madiun dan Pemkab Nganjuk, pada hari Kamis (28/12). Bantuan yang diberikan kepada Madiun berupa satu unit mobil operasional. Sementara bantuan yang diberikan kepada Nganjuk yaitu satu unit mobil ambulans GP Ansor dan 50 unit tenda kerucut.

Untuk CSR di Madiun, bantuan diserahkan oleh AVP Komunikasi Korporat bankjatim Bambang Supriadi kepada Wali Kota Madiun Madi. Kemudian di Nganjuk, CSR diserahkan oleh Direktur Kepatuhan bankjatim Tonny Prasetyo kepada Pj. Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna.

Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menjelaskan, tujuan diberikannya mobil operasional ke Pemkot Madiun adalah untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di Kota Madiun. "Semoga bankjatim dapat terus menjadi mitra kerja Pemkot Madiun yang berperan aktif serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya di wilayah Madiun. Dan kami juga berharap bankjatim Cabang Madiun dapat terus bersinergi dalam mendukung program yang dijalankan Pemkot selaku stakeholder maupun masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah," tegasnya.



Selanjutnya, terkait bantuan CSR di Nganjuk, Direktur Kepatuhan bankjatim Tonny Prasetyo mengatakan, ambulans untuk Pemkab Nganjuk ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan anggota GP Ansor Banser di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, bantuan ambulans tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bankjatim kepada masyarakat di bidang kesehatan. Sehingga, masyarakat yang membutuhkan bisa langsung memperoleh pelayanan dengan cepat dan bankjatim dapat ikut berkontribusi untuk turut serta meningkatkan, memperlancar, dan memfasilitasi kegiatan pelayanan yang baik serta berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk.

"Kami berharap ambulans ini dapat memperluas jangkauan masyarakat. Aksi penyerahan CSR ini juga sekaligus sebagai bentuk komitmen bankjatim untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik bagi instansi, komunitas, maupun masyarakat sekitar," lanjut Tonny.

Selain ambulans, bankjatim juga memberikan 50 unit tenda kerucut yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM di Kabupaten Nganjuk. "Puluhan tenda-tenda itu dapat digunakan untuk menggantikan tenda-tenda UMKM yang telah rusak sehingga para pelaku usaha mikro merasa lebih nyaman saat musim hujan. Selain itu, pemberian tenda juga sebagai bentuk dukungan serta optimalisasi kegiatan UMKM sebagai salah satu penopang sektor perekonomian," papar Tonny.

bankjatim berharap bantuan tenda kerucut untuk Kabupaten Nganjuk ini dapat menciptakan peningkatan ekonomi masyarakat ke depannya. "Kami juga berharap semoga masyarakat Nganjuk bisa lebih mengoptimalkan lagi penggunaan JConnect untuk soal pembayaran, karena bisa cashless dan sangat praktis. Bisa bayar apapun tanpa harus datang ke kantor," lanjut Tonny.

Pj. Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bankjatim atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Pihaknya berharap semoga kerja sama dengan bankjatim bisa terus berlanjut. "Kami juga sangat mengapresiasi bankjatim yang telah memperhatikan dunia kesehatan. Kami akan manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendukung dan melayani masyarakat," ungkapnya.



Tidak hanya di Madiun dan Nganjuk saja. Pada hari Rabu (27/12), bankjatim juga telah menyerahkan CSR kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berupa sarana dan prasarana untuk kelompok rentan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Corporate Secretary bankjatim Wioga Adhiarma Aji kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tiat S. Suwardi. Sarana dan prasarana yang diberikan antara lain kursi roda, kruk, papan informasi, petunjuk arah, smart tv, tongkat difabel, dan masih banyak lagi.



Adapun bantuan tersebut merupakan upaya perwujudan pelayanan publik yang inklusif dan juga sebagai bentuk kepedulian untuk menjamin serta melindungi hak kelompok rentan dalam mendapatkan pelayanan yang adil dan setara.

Busrul menuturkan, ada beberapa tujuan pemberian sarana dan prasarana kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur. Yaitu memberikan pelayanan ruang baca yang nyaman kepada pemustaka, termasuk kelompok rentan yang datang di perpustakaan, serta untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses. "Semoga bantuan dari bankjatim ini bisa membawa dampak positif untuk masyarakat dan dapat memberikan pelayanan prima untuk pemustaka yang berkunjung ke perpus," tegasnya.

<https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/berita/gencar-salurkan-csr-bukti-nyata-bank-jatim-berkontribusi-untuk-negeri>

# Launching Tiga Program Unggulan Perumda Tugu Tirta

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik **15/04/2025**

Kedungkandang (malangkota.g.id) – Pelayanan publik memegang peranan penting dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan, sehingga perlu disepakati bersama bahwa pelayanan yang efisien dan sinergis akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat, dan transparan.



**Launching TTC di kantor Perumda Tugu Tirta Kota Malang (Foto: Prokompim Setda Kota Malang)**

Hal ini ditekankan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat hadir meresmikan tiga program unggulan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Selasa (15/4/2025). Tiga program inovatif yang diluncurkan tersebut adalah aplikasi Tugu Tirta Connect (TTC), konstruksi meter air horizontal atas, serta promo diskon 50% bagi 111 pendaftar pertama, promo spesial yang hadir dalam rangka menyemarakkan HUT ke-111 Kota Malang

Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu mengungkapkan bahwa aplikasi TTC yang diluncurkan ini menjadi langkah strategis dalam pengembangan pelayanan yang lebih responsif dan berbasis teknologi. Dengan kata lain, program ini merupakan langkah nyata penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, yang memberi kemudahan akses bagi pelanggan untuk memperoleh informasi, menyampaikan keluhan, maupun melakukan transaksi layanan secara digital, cepat, dan transparan.

“Di sisi lain, peluncuran tiga inovasi ini dapat saya nilai sebagai langkah progresif yang sejalan dan mendukung pencapaian misi keempat Kota Malang, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan sinergis,” imbuhan Wahyu. Tidak hanya sebagai pencapaian teknis, tetapi ini juga pengejawantahan dari semangat Dasa Bakti Wali Kota Malang bersama Wakil Wali Kota Malang yaitu Ngalam Ngopeni, yang berprinsip pelayanan sepenuh hati, berorientasi pada penjaminan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi segenap masyarakat secara berkeadilan.

Wahyu pun berharap adanya inisiatif-inisiatif baru yang lahir dari perangkat daerah dan perumda lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat. “Untuk itu, jangan pernah berhenti berkreasi, jangan ragu untuk bertransformasi. Dunia berubah cepat, maka pemerintahan yang adaptif dan

responsif adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kota Malang yang kita cintai ini harus terus bergerak maju dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan publik yang prima,” bebernya.

Pada kesempatan ini Wahyu mengajak berbagai pihak untuk menjadikan momentum ini sebagai pengingat, bahwa pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah tugas mulia sekaligus amanah yang harus selalu dijaga dan tingkatkan. “Semoga seluruh program dan inovasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Malang dan semakin memperkuat posisi Perumda Tugu Tirta sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang air bersih,” pungkasnya. (say/yn)

<https://malangkota.go.id/2025/04/15/launching-tiga-program-unggulan-perumda-tugu-tirta/>

## CSR dan Iklim Investasi Kondusif Jadi Upaya Pemprov Jateng Bersama Pengusaha Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

06 February 2025 | 10:45:00 | dibaca : 286



**KUDUS** – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan para pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Kolaborasi ini diwujudkan dengan penyelenggaraan program *corporate social responsibility* (CSR) serta mengupayakan iklim investasi yang sehat dan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri maupun asing.

Hal itu disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dalam kunjungannya ke PT Djarum dan PT Pura Barutama yang berlokasi di Kabupaten Kudus pada Kamis, 6 Februari 2025.

PT Djarum dan PT Pura Barutama sama-sama memiliki kegiatan yang mendukung program pemerintah melalui *corporate social responsibility* (CSR). Kegiatan tersebut bersinggungan langsung dengan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menuntaskan kemiskinan.

PT Djarum memiliki program CSR berupa bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH); Audisi Umum Atlet PB Djarum; Siap Darling (Siap Sadar Lingkungan); serta Bakti Sosial, Bakti Olahraga, Bakti Pendidikan, dan Bakti Budaya.

Sementara itu, PT Pura Barutama memiliki beberapa program CSR terkait pengembangan masyarakat dan lingkungan, di antaranya Pura Cerdas untuk pendidikan anak-anak karyawan; Pura Peduli terkait pelestarian alam, seperti pelestarian Gunung Muria sebagai sumber mata air; Pura Pintar untuk mendukung siswa di area Pura Group; Pura Terampil untuk mendukung kegiatan ibu-ibu dan remaja putri menambah keterampilan; serta Pura Ramah untuk bantuan mengelola sampah.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur mengatakan, kedua perusahaan juga telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam mendukung program prioritas pemerintah, serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat.

"Kami bangga, Jateng memiliki perusahaan besar yang produknya sudah diekspor ke berbagai negara. Apalagi dua perusahaan ini merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Ini bisa menjadi contoh dan gambaran bagaimana iklim industri dan investasi di Jawa Tengah sangat baik, sehingga dapat menarik minat investor dalam negeri dan luar negeri," ungkapnya.

Sebagai informasi, PT Djarum sebagai perusahaan padat karya mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Setidaknya ada sekitar 65 ribu karyawan yang bekerja untuk memproduksi sigaret kretek tangan (SKT) dan sekitar 2.000 karyawan untuk sigaret kretek mesin (SKM). Sementara PT Pura Barutama setidaknya telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16 ribu orang.

"Kita harapkan perusahaan ini tidak cukup untuk berpuas diri, tetapi terus berinovasi dan bertumbuh kembang," jelas Pj Gubernur.

Adapun dalam kunjungannya ke pabrik PT Djarum, Pj Gubernur mendapatkan kesempatan untuk mencoba membuat rokok kretek secara langsung.

[https://humas.jatengprov.go.id/detail\\_berita\\_gubernur?id=9388](https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=9388)

# Jerat Pengoplos Beras dengan TPPU: Kejagung Panggil 6 Perusahaan, Dugaan Korupsi Diusut

Novitri Selvia

- Selasa, 29 Juli 2025 | 10:45 WIB



dalami dalam pengoplosan beras ini apa masuk ranah pidana umum atau pidana korupsi," terangnya.

Bila ternyata masuk dalam pidana korupsi. Maka, Kejagung bisa menangani kasus tersebut. "Kalau masuk korupsi, nanti rekom kita bisa masuk. Kalau pidana umum, nanti yang berwenang di penyidik Polisi," tuturnya.

Menurutnya, nantinya bila masuk ke pidana umum, Kejagung tentu memberikan dukungan dalam tingkat penuntutan. "Kita support, penyidik berjalan dan kita pastikan kebijakannya," jelasnya.

Hingga Senin sore, Kapuspenkum masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap enam perusahaan tersebut. "Kita tunggu saja," paparnya.

Sementara Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang ([TPPU](#)) Yenti Garnasih menjelaskan, dalam kejahatan ekonomi semacam ini penting untuk menjerat TPPU. Sehingga, uang hasil kejahatan bisa disita. "Karena memang motifnya ekonomi, untung dengan mengoplos beras," urainya.

aan pengoplos beras  
gkinan adanya tindak

Anang

an diperiksa terkait  
kan diperiksa," paparnya.

hastikan ada atau tidak  
eras tersebut. "Kami

Mudah untuk mengetahui uang hasil kejahatan mengoplos beras. Tinggal melihat aliran dana menjadi aset atau lainnya. "Bisa dilihat jadi aset perusahaan atau menjadi mobil dan rumah," paparnya.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polri telah menaikkan status kasus beras oplosan dari penyelidikan ke penyidikan. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menuturkan bahwa paska temuan dari Kementan, Satgas Pangan Polri melakukan langkah. Terdapat ratusan sampel dari berbagai merk yang diuji laboratorium. "Dari uji laboratorium ini telah keluar hasilnya untuk lima merk dari tiga produsen," paparnya.

Kelima merk tersebut sesuai hasil uji laboratorium dipastikan tidak sesuai mutu. Yakni, Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, Setra Pulen, Sania, dan Jelita.

"Kelima merk beras premium milik tiga produsen yaitu PT PIM sebagai produsen merek Sania, PT FS produsen Setra Ramos Merah, Biru, dan Pulen, serta Toko SY produsen Jelita," paparnya.

Menurutnya, penggeledahan juga dilakukan di empat titik lokasi yaitu di Jakarta Timur, Subang, dan Serang. Total 201 ton beras dalam berbagai kemasan disita bersama dokumen produksi, izin edar, serta hasil uji laboratorium.

"Kami tegaskan, praktik memperdagangkan produk pangan yang tidak sesuai mutu dan takaran adalah kejahatan. Polri berkomitmen untuk menindak tegas pelaku-pelaku usaha yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Saat ini, kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Para pelaku disangkakan melanggar Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 3, 4, dan 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi keberhasilan dan kerja cepat Polda Riau dalam membongkar beras premium oplosan. Menurutnya, pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

Dia memastikan pihaknya akan terus menjalin sinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lain. "Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera," katanya dalam keterangan tertulis, kemarin (27/7).

Direktorat Kriminal Khusus (Dirreskrim) Polda Riau berhasil mengungkap kasus beras oplosan bermerek SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) milik Perum Bulog yang dilakukan seorang pelaku berinisial R di Kota Pekanbaru, Riau.

Modusnya, pelaku mencampur beras medium dengan beras reject, kemudian dikemas ulang ke dalam karung beras SPHP berukuran 5 kilogram dan dijual ke pasaran dengan harga Rp 13.000 per kilogram. Padahal, modalnya hanya sekitar Rp 6.000 hingga Rp 8.000.

Modus kedua, pelaku membeli beras kualitas rendah dari wilayah Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung-karung bermerek premium seperti Aira, Family,

Anak Dara Merah hingga Kuriak Kusuik, sehingga tampak seolah-olah sebagai produk unggulan.

Dalam expose kasus di sebuah toko beras di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayanraya, Kota Pekanbaru, Sabtu (26/7), Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, pelaku merupakan pemain lama di dunia distribusi beras di Riau dan telah menjalankan dua modus curang untuk memperoleh keuntungan berlipat.

"Saat ini R telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini bukan hanya soal penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan rakyat kecil, termasuk anak-anak kita yang sangat membutuhkan pangan bergizi," sebut Herry.

Barang bukti yang diamankan di antaranya 79 karung beras SPHP kemasan 5 kilogram berisi beras oplosan, 4 karung bermerek lain yang juga diisi beras ladang, 18 karung kosong SPHP, serta satu unit timbangan digital.

Juga, satu unit mesin jahit, 12 gulung benang jahit, dan dua buah mangkok. Jumlah total beras oplosan yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 8 hingga 9 ton.

Atas perbuatannya, R dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ia terancam hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Menurut Amran, kecurangan pangan tersebut sebelumnya telah menjadi bahasan serius antara dirinya dengan Kapolda Riau pada awal pekan lalu ketika melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru.

Praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana program SPHP ini didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi.

<https://padek.jawapos.com/nasional/2366361319/jerat-pengoplos-beras-dengan-tppu-kejagung-panggil-6-perusahaan-dugaan-korupsi-diusut?page=3>

# Skincare Diduga Milik Athena Group Disita, BPOM Minta Masyarakat Tidak Tergiur Promosi Sesat



JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyita 2.475 buah skincare beretiket biru yang tidak sesuai dengan ketentuan beberapa waktu lalu. Salah satu diantaranya adalah skincare yang mengandung DNA Salmon, diduga milik Athena Group yang terafiliasi dengan influencer dokter Richard Lee.

Parahnya meski sudah dinyatakan beretiket biru, produk tersebut masih dijual bebas di online shop. Padahal, produk tersebut tak terdaftar di BPOM dan pemakaiannya harus melalui pengawasan dokter spesialis khusus.

Berdasarkan keterangan tertulisnya, BPOM mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti dan tidak mudah percaya pada promosi yang tidak benar, berlebihan, menyesatkan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Termasuk promosi dan penjualan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, baik di media penjualan online maupun offline,” kata BPOM dalam keterangan resminya di Jakarta, 26 Juni 2024.

Selain itu, masyarakat juga diminta selalu menerapkan Cek KLIK sebelum memilih atau membeli produk kosmetik/skincare, yaitu cek Kemasan, cek Label, cek Izin edar, dan cek Kedaluwarsa.

“Kaidah Cek KLIK menjadi salah satu kunci dan benteng utama pertahanan konsumen agar terhindar dari produk yang berisiko bagi kesehatan. Dengan menerapkan Cek KLIK, konsumen mempunyai kendali penuh untuk memperhatikan produk dengan seksama sebelum membeli dan menggunakannya,” lanjutnya.

Karena menurut BPOM, etiket biru adalah istilah yang digunakan untuk sediaan farmasi yang dibuat untuk digunakan pada bagian luar tubuh (obat luar) yang mengandung bahan obat (keras) dan diberikan dengan resep/pengawasan dokter sebagai produk racikan.

Lebih lanjut, skincare beretiket biru merupakan produk yang bersifat personal, khusus disiapkan untuk pasien yang telah berkonsultasi dengan dokter yang menuliskan resep berdasarkan diagnosis.

“Jadi, seharusnya skincare tersebut hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Skincare beretiket biru juga memiliki jangka waktu kestabilan yang pendek sehingga tidak untuk dipergunakan dan/atau disimpan dalam jangka waktu lama,” kata BPOM.

BPOM menyebut jika skincare beretiket biru pun seharusnya berupa produk racikan yang jumlahnya terbatas, bukan untuk diproduksi massal, hanya digunakan sesuai kebutuhan, dan tidak dijual online.

“Penggunaan bahan obat keras pada kosmetik tanpa resep atau pengawasan dokter seperti ini tentunya berisiko terhadap kesehatan,” lanjut BPOM.

Sementara itu, skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan yaitu produk perawatan kulit yang mengandung bahan obat (keras) yang diberikan tanpa resep/pengawasan dokter atau dibuat sebagai produk racikan secara massal dan dijual melalui online.

Senada, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin dr Edwin Tanihaha Sp.KK menyebut agar masyarakat pengguna skincare sebaiknya bisa lebih teliti dalam memilih produk yang dijual bebas apakah terregistrasi BPOM atau tidak.

“Itu dilihat nomor seri BPOM-nya, kemudian bila itu produk dokter bisa ditanyakan manfaat serta ingredients secara umumnya apa supaya kita bisa mengerti produk yang akan kita pakai,” kata dia.

Namun, menurutnya jika produk yang dibeli secara online tidak ada no seri BPOM atau barcode BPOM, sebaiknya tidak pakai.

“Karena resiko lebih besar dibanding keuntungannya,” kata Edwin.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa biasanya, injeksi DNA Salmon hanya bisa dikerjakan oleh dokter spesialis kulit estetik atau dokter estetik yang sudah memahami manfaat produk dan sudah terlatih dalam penyuntikan produk.(\*\*)

<https://fokusborneo.com/ekonomi/2024/06/26/skincare-diduga-milik-athena-group-disita-bpom-minta-masyarakat-tidak-tergiur-promosi-sesat/>